









respons terhadap kepincangan-kepincangan yang dikalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah kolonial Belanda. Langkah pertama dalam bentuk kesadaran berorganisasi.

Walau banyak cara yang ditempuh oleh pemerintah kolonial waktu itu untuk membendung pergolakan rakyat Indonesia melalui media pendidikan namun tidak banyak membawa hasil, malahan berakibat sebaliknya makin menumbuhkan kesadaran tokoh-tokoh organisasi Islam untuk melawan penjajah Belanda, dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan rasa nasionalisme dikalangan rakyat dengan melalui pendidikan. Dengan sendirinya kesadaran bergorganisasi yang di jiwai oleh perasaan nasionalisme yang tinggi, menimbulkan perkembangan dan era baru dilapangan pendidikan dan pengajaran.

Para pemimpin pergerakan nasional dengan kesadaran penuh ingin mengubah keterbelakangan rakyat Indonesia. Mereka menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam agenda perjuangannya. Maka lahirlah sekolah-sekolah pertikelir (swasta) atas usaha para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu semula memiliki dua corak, yaitu:

- a. Sesuai dengan haluan politik:
  - i. Taman Siswa, didirikan di Yogyakarta.
  - ii. Sekolah Sarikat Rakyat di Semarang, yang berhaluan komunis.



















disebut Priesterraden. Atas nasihat dari badan inilah maka pada tahun 1905 M pemerintah mengeluarkan peraturan yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran (pengajian) harus minta izin lebih dahulu. Pada tahun itu memang sudah terasa adanya ketukan dari pemerintahan Belanda terhadap kemungkinan kebangkitan pribumi, karena pada saat itu pula terjadinya peperangan antara Rusia melawan Jepang, yang dalam peperangan ini dimenangkan oleh Jepang.

Terlihat pada tahun 1925 M pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (Kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan itu mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama dan lain-lain.

Kemudian pada tahun 1932 M keluar pula peraturan yang dapat menutup dan memberantas madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak sesuai atau tidak disukai oleh pemerintah yang disebut Ordonasi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie). Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 M, berupa Sumpah Pemuda. Selain daripada itu untuk lingkungan kehidupan agama Kristen di Indonesia selalu menghadapi reaksi rakyat Indonesia, dan untuk menjaga dan menghalangi masuknya pelajaran agama disekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut netral agama. Yakni bahwa pemerintah bersikap tidak memihak kepada salah satu







- e. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta.
- f. Para ulama Islam bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan untuk membentuk barisan Pembela Tanah Air (Peta). Tokoh-tokoh santri dan pemuda Islam ikut dalam latihan kader militer itu, antara lain: Sudirman, Abd. Khaliq Hasyim, Iskandar Sulaiman, Yusuf Anis, Aruji Kartawinata, Kasman Singodimejo, Mulyadi Joyomartono, Wahin Wahab, Sarbini Saiful Islam dan lain-lain. Tentara Pembela Tanah Air inilah yang menjadi inti dari TNI sekarang.
- g. Umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut: Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang bersifat kemasyarakatan.

Maksud dari pemerintah Jepang mengadakan kebijakan seperti ini adalah supaya kekuatan umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang.

Perang Dunia ke II menghebat dan tekanan pihak sekutu kepada Jepang semakin berat. Beberapa tahun menjelang berakhirnya perang tampak semakin jelas betapa beratnya Jepang menghadapi musuh dari luar dan oposisi dari rakyat itu sendiri. Dari segi militer dan sosial politik di Indonesia Jepang menmpakkan diri sebagai penjajah yang sewenang-wenang dan lebih kasar daripada penjajah Belanda. Kekayaan bumi Indonesia dikumpulkan secara paksa untuk membiayai Perang Asia Timur Raya, sehingga rakyat menderita kelaparan dan hampir



perang berarti pahlawan jihad yang terkategori sebagai syuhada' perang. Isi fatwa tersebut adalah:

- a. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan.
- b. Pemerintahan RI adalah sat-satunya pemerintah yang sah yang wajib dibela dan diselamatkan.
- c. Musush-musuh RI (Belanda/Sekutu), pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karenan itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka.
- d. Kewajiban-kewajiban tersebut diatas adalah jihad fisabilillah.

Ditinjau dari segi pendidikan rakyat, maka fatwa ulama tersebut memiliki arti yang besar sekali:

- a. Para ulama dan santri-santi dapat mempraktekkan ajaran jihad fisabilillah yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci fiqh dipondok atau di madrasah.
- b. Pertanggungjawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ditengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama itu secara formal isntitusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen P & K (Dep Dik Bud). Oleh karena itu maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama























